BAPPERIDA

TEMA DAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2028

Pacitan, 29 Oktober 2026



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

SSWW
SATSET WATWET

Tema RKPD Tahun 2028

“ PENGUATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN DAERAH “



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

SSWW
SATSET WATWET

Prioritas RKPDTahun 2028

- Peningkatan Daya Saing Pendidikan dan Kesehatan
- Kemandirian Pangan Masyarakat
- Pengembangan Jejaring Peluang Investasi
- Penguatan Kapasitas Kawasan Pariwisata
- Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Usaha
- Fasilitasi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja
- Pendampingan Keluarga Beresiko stunting
- Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum
- Pengelolaan Manajemn ASN berbasi sistem merit

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

SSWW
SATSET WATWET

Arah Kebijakan

PENINGKATAN DAYA SAING PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
2. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
3. Peningkatan kualitas sistem Pendidikan
4. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
5. Peningkatan kualitas SDM melalui akses dengan pemerataan sarana prasarana Pendidikan dan pelayanan Kesehatan
6. Pemenuhan infrastruktur kepemudaan dalam pengembangan potensi
7. Memberikan akses kesehatan dan pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat miskin dan rentan



Arah Kebijakan

PENDAMPINGAN KELUARGA BERESIKO STUNTING

1. Percepatan Penanganan dan Pencegahan Stunting
2. Peningkatan Kualitas Keluarga
3. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
4. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar (transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah)
6. Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmigrasi, infrastruktur distribusi dan Listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan



Arah Kebijakan

FASILITASI PERLUASAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan menghubungkan kerjasama dengan perusahaan
2. Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan industri.

PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA

1. Kolaborasi yang melibatkan lembaga-lembaga non pemerintahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
2. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
3. Pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk perempuan



Arah Kebijakan

KEMANDIRIAN PANGAN MASYARAKAT

1. Mempercepat pertumbuhan UMK dan IKM dalam sektor pengolahan hasil pertanian
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak
3. Mengembangkan infrastruktur logistik dan jaringan distribusi perdagangan untuk mendukung sektor unggulan
4. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan melalui penguatan hilirisasi berbagai sektor
5. Perlindungan sosial yang merata diseluruh lapisan masyarakat dan berkeadilan
6. Perluasan penyediaan bantuan sosial peningkatan ketahanan pangan terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
7. Perluasan penyediaan bantuan sosial peningkatan ketahanan pangan terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat



Arah Kebijakan

PENGEMBANGAN JEJARING PELUANG INVESTASI

1. Menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha berbasis digital
2. Mengembangkan sistem deteksi dini dan penyelesaian konflik sosial di wilayah investasi .
3. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah

PENGELOLAAN MANAJEMN ASN BERBASI SISTEM MERIT

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN,
2. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta
3. Percepatan digitalisasi layanan publik
4. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib dan berintegritas menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan bebas korupsi



Arah Kebijakan

PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas
2. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
3. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat
4. Penguatan kerukunan antar etnis
5. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana
6. Penyediaan Infrastruktur kebencanaan yang memadai
7. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana alam geologi dan bencana lainnya
8. Memperkuat sistem mitigasi bencana berbasis data risiko bencana daerah
9. Penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana



Arah Kebijakan

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

1. pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
2. Mengoptimalkan konservasi lingkungan melalui rehabilitasi ekosistem dan penghijauan daerah kritis
3. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat

PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN PARIWISATA

1. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural.
2. Peningkatan konektivitas menuju/dari strategis kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
4. Meningkatkan kapasitas dan peran Pokdarwis dalam pengelolaan destinasi wisata
5. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
6. Penguatan pengelolaan jalan kewenangan kabupaten dan jalan desa
7. Peningkatan konektivitas jalan menuju/dari kawasan strategis



Penyusunan Kamus Usulan Tahun 2028

Hal-Hal yang perlu di perhatikan dalam menyusun kamus usulan :

1. Kamus Usulan di susun dengan mengacu prioritas dan arah kebijakan RKPD Tahun 2028 yang di ambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.
2. Penyusunan Kamus Usulan di sesuaikan dengan aktifitas, Program, Kegiatan dan sub kegiatan termasuk kemampuan anggaran
3. Sesuai dengan tusi OPD dan kewenangan daerah
4. memiliki definisi yang jelas dan tidak multitafsir
5. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat



Tahapan Penyusunan Kamus Usulan

Penentuan Prioritas RKPD
Tahun 2028

Penyelarasan Arah Kebijakan
dengan Aktifitas OPD

Penentuan Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan



Penentuan Arah Kebijakan
Tahun 2028

Penyusunan Kamus Usulan dan
Desk Kamus Usulan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

SSWW
SATSET WATWET

BAPPERIDA

TERIMAKASIH

Pacitan, 29 Oktober 2026



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

SSWW
SATSET WATWET